



SISTEM KETATANEGARAAN IDEAL MENURUT IBNU ABI RABI'

Abdul Gafur¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: gafur.judgement5@gmail.com¹, ahmadihasan58@yahoo.com², masyithah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 02-05-2024 | Revised 27-05-2024 | Accepted 20-06-2024

Abstract

Ibn Abi Rabi's perspective on the concept of the state fundamentally differs from the thoughts of Greek philosophers like Plato and Aristotle, primarily due to the strong integration of the Islamic worldview in his thinking. While Ibn Abi Rabi' agrees with Plato that a leader should be someone respected in society, he prefers monarchy as the best system of governance. He argues that leadership by a single king or ruler can maintain political stability and unity better than other forms of government such as aristocracy, oligarchy, democracy, and demagoguery, which can lead to chaos if citizens irresponsibly exercise their political rights. According to Ibn Abi Rabi', the basis of a king's authority stems from religious teachings, particularly the Qur'an (QS. al-An'am: 165), which states that a king's power and authority are a mandate from God. He sets forth six criteria for an ideal king: paternalistic ties to the previous king, noble aspirations, precise and strong vision, resilience in facing challenges, substantial wealth, and loyal assistants, without emphasizing Quraysh lineage. Ibn Abi Rabi' also identifies four main pillars in the formation of a state: the head of state, justice, the people, and management. By fulfilling these four pillars, he believes that the state will achieve political stability and strength.

Keywords: system, constitutional, ideal, ibnu Abi Rabi'

Abstrak

Pandangan Ibn Abi Rabi' mengenai konsep negara memiliki perbedaan mendasar dengan pemikiran para filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles, terutama karena integrasi kuat dari worldview Islam dalam pemikirannya. Ibn Abi Rabi' sependapat dengan Plato bahwa pemimpin haruslah seseorang yang dihormati di masyarakat, namun ia lebih memilih bentuk pemerintahan monarki sebagai sistem yang terbaik. Menurutnya, kepemimpinan oleh satu orang raja atau penguasa tunggal mampu menjaga kestabilan dan persatuan politik negara, dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya seperti aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan demagogi yang dapat menyebabkan kekacauan jika warga negara menyalahgunakan hak politiknya. Dasar otoritas raja menurut Ibn Abi Rabi' bersumber dari ajaran agama, khususnya Al-Qur'an QS. al-An'am: 165, yang menyatakan bahwa kekuasaan dan otoritas raja adalah mandat dari Tuhan. Ia menetapkan enam syarat bagi calon raja yang ideal, yaitu hubungan paternalistik dengan raja sebelumnya, aspirasi luhur, pandangan yang tepat dan kuat, ketahanan dalam menghadapi tantangan, kekayaan besar, dan pembantu setia, tanpa menekankan keturunan Quraisy. Ibn Abi Rabi' juga mengemukakan empat pilar utama dalam pembentukan negara: kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan. Dengan terpenuhinya keempat pilar tersebut, ia meyakini bahwa negara akan menjadi stabil dan kuat secara politis.

Kata kunci : sistem, ketatanegaraan, ideal, ibnu Abi Rabi'

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Jauh sebelum kepopuleran para pemikir Barat dalam bidang pemikiran politik pasca-*renainssance*,¹ para pemikir Islam terlebih dahulu sudah memperkenalkan bangunan kerangka pemikiran tentang politik. Dalam pandangan sebagian para pemikir Barat menilai bahwa para pemikir Muslim merupakan pioneer etika dan pemikiran filsafat, namun tidak ada sumbangsih penting dan jelas dalam bidang pemikiran politik, bahkan mereka menganggap Agama dan Peradaban Islam tidak mempunyai konsep pemikiran politik apa pun. Pandangan ini tentu merupakan kekeliruan besar dan perlu diluruskan kembali. Sebab, masyarakat Eropa pada abad ke-16 dan abad-17 belum mengetahui secara konkret dan universal karakteristik atau tipikal pemikiran politik umat Islam.

Dalam konteks pemikiran Islam, para pemikir politik Islam telah menawarkan argumen-argumen tentang sistem kenegaraan serta bagaimana tata negara yang ideal dalam konsep politik Islam. Berbagai pandangan yang muncul tersebut menggambarkan dialektika hubungan Islam dengan politik yang diwarnai oleh kondisi sosial politik umat Islam.² Konsep-konsep tentang negara dan sistem pemerintahan serta hubungan berbagai komunitas dalam suatu negara menjadi isu yang menjadi fokus kajian para pemikir tersebut.

Jika kita melihat ke belakang, akan dijumpai banyak tokoh pemikir politik dalam peradaban Islam yang memiliki pemikiran politik kritis dan filosofis. Tokoh-tokoh tersebut mayoritas hidup pada era Khilafah Abbasiyah. Di antara tokoh-tokoh yang cukup terkenal yaitu Al-Baqillani (w. 1013 M), Al-Baghdâdi (w. 1037 M), Ibnu Abi Rabi' (hidup pada masa Khalifah Al-Mu'tashim 833-842 M), Al-Mawardi (974-1058 M), Al-Juwaini (1028-1087 M), Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyyah (1262-1328 M) dan Ibn Khaldûn (1332-1406 M).³ Pemikiran tokoh-tokoh tersebut masih dapat kita kaji ulang. Sebab karya-karya tulis mereka telah terdokumentasikan dengan baik hingga saat ini.

Dari sekian nama tokoh di atas, agaknya Ibnu Abi Rabi' adalah tokoh yang paling menarik untuk dikaji pemikiran politiknya. Sebab dibandingkan dengan

¹ abad pembaharuan antara abad ke 14 sampai dengan abad ke 17 Masehi dalam sejarah Eropa

² M. Ilham et al, "Caliphate; Is It Theological Inevitability or Sociological Experimentation?," dalam Jurnal Ushuluddin 29, no. 1 (2021), hlm.61

³ Adil Tsabit, *Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi* (Alexandria: Dar al-Jami'ah al-Jadid, 2002), hlm.45

al-Mawardi, Ibnu Abi Rabi' lebih dahulu hidup, yaitu pada masa pemerintahan al-Mu'tashim. Dengan demikian Ibnu Abi Rabi' merupakan tokoh pemikir politik yang paling awal dalam sejarah peradaban Islam yang karyanya masih dapat dijumpai hingga sekarang. Lebih dari pada itu, Ibnu Abi Rabi' tidak saja berperan sebagai pengamat atau pemikir politik belaka, ia juga berperan sebagai penasihat bagi Khalifah Abbasiyah yang saat itu berkuasa. Bahkan karyanya tentang tata negara yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Kebijakan Raja dalam Mengelola Pemerintahan) menjadi semacam buku panduan kenegaraan pada masa pemerintahan Khalifah Dinasti Abbasiyyah kedelapan, al-Mu'tasim Billah.⁴ Maka penulis memandang sosok Ibnu Abi Rabi' sebagai pakar ilmu politik yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan juga berotoritas, sehingga layak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Pemikir Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politiknya dalam suatu karya tulis adalah Ibnu Abi Rabi', yang hidup di Baghdad semasa Khalifah al-Mu'tashim, khalifah Bani Abbasiyah ke-8, putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan yang menggantikan kakaknya, yaitu al-Makmun. Setelah Ibnu Abi Rabi', barulah menyusul generasi setelahnya, seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Dari merekalah sekiranya dapat kita anggap sebagai *founding person* yang mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada abad Klasik dan pertengahan.⁵

Dalam Makalah ini, penulis fokus pada pemikiran politik Ibnu Abi Rabi' terkhusus pemikirannya terkait sistem negara dan pilar-pilar bernegara. Isu ini menarik untuk didiskusikan sebab ia termasuk pemikir politik yang mendukung sistem negara monarki dan ia telah menjelaskan kelebihan sistem tersebut dalam bukunya *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* pada dasarnya tidak hanya membahas terkait teks saja, tapi juga membahas latar belakang penulisnya disertai konteks dari gagasan Ibnu Abi Rabi'.

B. PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup Ibnu Abi Rabi'

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abi Rabi' (W.272 H/ 885 M), yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah (Baghdad, Irak).⁶ Pada masa itu ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang dan spesialisasinya

⁴ Rambe, "Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan," hlm.20

⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.5

⁶ Syihabuddin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abi Ar-Rabi'. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. Riyadh: Dar al-'Adzariyah, 2010, hlm.10

mendapatkan tempat dan perhatian serius, baik oleh para peneliti dan pemikir Islam, dan bahkan mendapatkan dukungan besar dari para penguasa, terutama pada masa Khalifah al-Makmun, yaitu; Khalifah Dinasti Abbasiyah ketujuh. Iklim inilah yang kemudian memunculkan perhatian besar dan tingginya minat di kalangan para sarjana Islam untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan secara rasional. Setelahnya mulai bermunculan sejumlah pemikir Islam yang mengemukakan gagasan atau konsep politik mereka melalui karya-karya yang dituliskannya.⁷

Ibn Abi Rabi' dianggap sebagai sarjana muslim pertama yang menuangkan gagasan teori politiknya dalam sebuah karya tulis.⁸ Karyanya terkait politik yaitu buku yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Kebijakan Raja dalam Mengelola Pemerintahan). Buku ini dipersembahkan kepada al-Mu'tasim, Khalifah Dinasti Abbasiyyah kedelapan yang memerintah pada abad IX Masehi untuk dipergunakan sebagai *guiding book* dalam *mentadbir* atau mengelola pemerintahan.

Karena buku ini diperuntukkan oleh Ibn Abi Rabi' kepada Kepala Negara yang sedang berkuasa saat itu, Munawir Sjadzali menegaskan dapat dipastikan bahwa Ibn Abi Rabi' tidak mempersoalkan sistem Monarki sebagai suatu sistem pemerintahan yang sedang berjalan, bahkan Ibn Abi Rabi' memberikan dukungan penuh kepada sistem pemerintahan ini.⁹

Pengakuan Ibn Abi Rabi' terhadap sistem pemerintahan monarki (kerajaan) ini ditunjukkan oleh Ibn Abi Rabi' dalam kata pengantar bukunya berupa sanjungan kepada Khalifah, ia mengatakan:

“Merupakan kebahagiaan bagi penduduk atau rakyat zaman ini karena pemimpin mereka (*Imamahum*), ketua tertinggi mereka (*Muqallid siyasatihim*), dan pengelola pemerintahan mereka (*wa Mudabbir mulkihim*) adalah seorang yang telah terkumpul semua kebaikan, semua kelebihan dan keutamaan (*kehormatan*), terkumpul semua sifat yang terpuji, yaitu orang yang selalu memperbaiki kondisinya dengan tetap komitmen pada agama, dan tetap berpegang teguh pada Islam dan ajaran Nabi, yaitu Khalifah al-Mu'tashim Billah, Amirul Mu'minin, di mana semua umat taat

⁷ Nasution, Amhar. *Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Periode Harun Al-Rasyid Dan Al-Makmun*. Al-Hadi II, no. 02 (2017), hlm.401

⁸ Muhammad Jalal Syaraf. *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*. Dar al-Ma'rifah al-Jami'ah, 1990, hlm.204

⁹ Munawir Sjadzali. *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*. Jakarta: UI- Press, 1993, hlm.42

kepadanya, semua kerajaan patuh kepadanya, dan para musuh tunduk kepadanya.”¹⁰

Menurut keterangan Arif Ahmad Abd al-Ghani,¹¹ tidak banyak yang dapat diketahui tentang Ibn Abi Rabi`, selain dia sebagai penulis buku yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Bahkan terkait kapan tepatnya ia dilahirkan dan kapan wafatnya pun masih diragukan keakuratannya. Menurut al-Zarkali dalam *al-A’lam*¹² dan Kahalah dalam *Mu’jam Mu’alifin*,¹³ ia di lahirkan pada tahun 218 H dan wafat pada 272 H. Namun data ini menjadi kontradiktif dengan keterangan bahwa Ibnu Abi Rabi’ menghadiahkan bukunya kepada Khalifah Mu’tashim yang berkuasa antara tahun 218 hingga 227 H, sehingga bagaimana mungkin ia dapat menghadiahkan Kitab padahal masih usia bayi.¹⁴

2. Pemikiran Ibnu Abi Rabi’ tentang Negara

Ibnu Abi Rabi` berpandangan bahwa secara fitrah manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu diperlukan kerja sama dan hubungan timbal balik antara sesama manusia guna menunjang kebutuhan hidupnya. Melalui interaksi sosial yang terjadi antar sesama individu terbentuklah interaksi yang semakin luas dimensinya dan kemudian terbentuklah suatu komunitas masyarakat.¹⁵ Komunitas masyarakat yang menetap di suatu tempat ini merupakan embrio terbentuknya organisasi kekuasaan (negara).¹⁶

Keperluan dan hajat hidup yang dibutuhkan menurut Ibnu Abi Rabi` meliputi;

- 1) Pakaian (al-libas) untuk melindungi diri dari rasa sakit udara panas, udara dingin, dan tiupan angin kencang,
- 2) Kebutuhan terhadap makanan yang menjadikan jasmani kuat untuk beraktivitas dan bekerja,
- 3) Tempat tinggal untuk penjagaan dan pertahanan dari berbagai ancaman bahaya,
- 4) Reproduksi untuk menjamin kelangsungan kehadiran manusia di muka bumi ini,

¹⁰ Ibn Abi Ar-Rabi’. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. hlm.43

¹¹ Ia adalah pentahqiq kitab *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*.

¹² Zarkali. *Al-A’lam*. Beirut: Dar al-’Ilm lil Malayin, hlm.205

¹³ Kahalah. *Mu’jam Al-Mu’alifn*. Beirut: Mu’asasah al-Risalah, hlm.101

¹⁴ Ibnu Abi Ar-Rabi’. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. hlm.10-11

¹⁵ Khotimah, “Agama Dan Civil Society,” dalam *Ushuluddin* 1, no. 0 (2014), hlm. 124

¹⁶ Munawir Sjadzali. *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*, hlm.43

5) Pelayanan kesehatan untuk menjaga kestabilan jasmani.¹⁷

Apabila diperhatikan secara sepintas, teori Ibnu Abi Rabi` tentang asal muasal lahirnya negara cukup identik dengan teori Plato yang sudah ada terdahulu. Namun apabila dicermati dengan seksama, akan tampak bahwa Ibnu Abi Rabi` tidak serta-merta menduplikasi teori Plato secara utuh, karena Ibn Abi Rabi` sebagai seorang muslim tidak terlepas dari *worldview* keislamannya. Hal ini dapat dikonfirmasi dalam gagasannya yang memasukkan paham ketuhanan dan memadukannya dengan pandangan-pandangannya tentang asal usul kemunculan negara atau kota. Hal inilah titik tolak membedakan gagasannya dengan gagasan Plato.¹⁸

Harus diakui beberapa gagasan Ibn Abi Rabi` tentang politik memang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Yunani Kuno, terutama Plato dan Aristoteles. Salah satunya adalah tentang penegasan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk ber peradaban (*anna al-insân madaniy bi thab`ihi*). Pandangan ini adalah pandangan yang disampaikan Aristoteles di dalam karyanya; *Politik*.¹⁹ Namun selanjutnya Ibn Abi Rabi` mengemasnya dalam bingkai keilmuan Islam (*Islamic framework*). Terdapat setidaknya tiga unsur tambahan yang didasarkan pada ajaran agama Islam dalam pandangan Ibnu Abi Rabi, yaitu;

- 1) Kecenderungan manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat merupakan watak atau tabiat yang diciptakan Allah kepada manusia.
- 2) Allah telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota masyarakat sebagai landasan yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan tersebut sudah termaktub di dalam kitab suci al-Qur`an.
- 3) Allah juga telah mengangkat penguasa-penguasa yang bertugas untuk memastikan berlakunya peraturan-peraturan di kalangan rakyat dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Ilahi.²⁰

Terkait dengan pemerintahan, Ibn Abi Rabi` berpandangan bahwa asas yang mendorong manusia untuk membentuk peradaban dan membentuk pemerintahan adalah karena secara naluriah manusia akan berusaha

¹⁷ Ibnu Abi Ar-Rabi`. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. hlm.104

¹⁸ Muhammad Jalal Syaraf. *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*. Hlm.212

¹⁹ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020), hlm.255

²⁰ Sirojuddin Aly. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm.376

terhindar dari keburukan (syarr). Dalam pandangannya keburukan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu;

- 1) keburukan yang berasal dari dalam diri manusia,
- 2) keburukan yang berasal dari masyarakat (penduduk) itu sendiri, dan
- 3) keburukan yang berasal dari masyarakat (penduduk) lain.

Adapun sarana untuk menghindarkan diri dari keburukan-keburukan tersebut tentu berbeda-beda. Untuk keburukan *kategori pertama*, dapat ditepis oleh seseorang di antaranya dengan menempuh jalan kebaikan, memperbaiki jiwanya, atau dengan bersikap rasional dalam berperilaku. Sedangkan untuk keburukan *kategori kedua*, dapat ditanggulangi dengan optimalisasi tata aturan dan hukum-hukum guna perbaikan masyarakat. Adapun pencegahan keburukan *kategori ketiga*, yaitu dengan memperkuat kemiliteran dan pembangunan sarana prasarana penunjangnya seperti senjata, benteng dan parit-parit.²¹

Pembahasan yang akan muncul selanjutnya setelah terbentuk kota atau negara adalah terkait dengan siapakah dan seperti apakah sosok yang akan mengatur jalannya suatu pemerintahan. Karena tidak mungkin sebuah negara wujud tanpa ada sosok yang memimpin. Menurut Ibn Abi Rabi' sosok yang patut memimpin suatu masyarakat adalah orang yang terbaik di antara mereka. Yaitu orang dengan kriteria, ketika memerintahkan sesuatu atau melarang terhadap sesuatu, ia memulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu baru kepada orang lain. Lebih jauh, Ibnu Abi Rabi' menyebut bahwa kriteria yang demikian merupakan kategori orang yang paling bijak dan paling adil. Dengan demikian kriteria pemimpin menurut Ibnu Abi Rabi' adalah orang yang mampu menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya serta konsekuen terhadap kebijakannya.

Dalam kaitannya dengan bentuk atau model pemerintahan, Ibnu Abi Rabi' lebih memilih bentuk pemerintahan yang berdasarkan monarki atau kerajaan. Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja berdasarkan warisan alur keturunan. Oleh karena itu, Ibnu Abi Rabi' tidak memilih model-model pemerintahan lain, seperti Aristokrasi,²²

²¹ Ibnu Abi Ar-Rabi'. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. hlm.98

²² Aristokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. Lihat Yones Eka Putra Waruwu, "Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno," dalam *Jurnal Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang* (2021): 3, <https://osf.io/2kygh>.

Oligarki,²³ Demokrasi,²⁴ ataupun Demagogik.²⁵ Dalam konteks ini Ibn Abi Rabi' memberikan argumentasi terkait pemikirannya tentang model pemerintahan dalam bentuk monarki, yaitu bahwa jika sebuah negara dipimpin oleh banyak pemimpin, maka perpolitikan akan kacau, banyak konflik yang menyebabkan negara selalu gonjang-ganjing (tidak stabil). Atas dasar argumentasi ini, warga masyarakat merasa perlu seorang pemimpin tunggal dalam pemerintahan kerajaannya.

Berdasarkan penjelasan Ibn Abi Rabi' di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Abi Rabi' telah memberi kemasan bagi pemikiran politiknya dengan sentuhan-sentuhan ajaran agama Islam. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pandangan Ibnu Abi Rabi' tentang kemunculan negara atau kota bukan pandangan yang mengikuti seratus persen pandangan Plato dan Aristoteles. Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa pandangan dan pemikiran Ibn Abi Rabi' tentang kemunculan negara sebagai pengembangan dari pemikiran Plato dan Aristoteles tetapi dengan dasar dan warna *worldview* Islam.

3. Pilar-pilar Negara Menurut Ibnu Abi Rabi'

Ibn Abi Rabi' menyampaikan konsepsinya tentang empat pilar penting yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Ibn Abi Rabi' menyebut pilar tersebut dengan arkan al-mamlakah. Menurutnya agar suatu negara bisa menjadi kuat harus terpenuhi secara ideal empat pilar tersebut. Empat arkan al-mamlakah itu ialah; kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan.³⁶ Berikut ini penjelasan mengenai empat unsur penting negara sebagai berikut;

a. Raja (Pemimpin)

Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu institusi. Terlebih dalam institusi negara yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Seorang kepala negara, entah yang bergelar Khalifah, Raja, atau Presiden, memainkan peran sentral dalam

²³ Oligarki adalah model pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang kaya

²⁴ Demokrasi adalah model pemerintahan yang dikelola oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, baik di Parlemen, Eksekutif ataupun Yudikatif melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu badan pemilihan untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan para wakil rakyat, baik untuk tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Lihat Elly Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," dalam dalam Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016), hlm.44

²⁵ Demagogik, yaitu apabila para warga di sebuah negara memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan Demokrasi dengan tidak bertanggung jawab, dan hanya berdasarkan keinginan, kecenderungan dan kepentingan masing-masing, tanpa memikirkan akibat dan dampak negatif yang muncul kemudian. Lihat Nurtiyastuti, "Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihanpresiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid as-Syariah," hlm.11.

kemajuan atau kemunduran suatu negara. Bahkan bisa dikatakan, kepala negara merupakan cerminan dari suatu negara. Melalui kepala negara yang amanah, bijaksana, cerdas, kuat, dan berdedikasi tinggi, akan tercermin gambaran masyarakat yang dipimpinnya. Begitu pula sebaliknya, kepala negara yang terlihat darinya sifat-sifat buruk, itulah cerminan masyarakatnya.

Mengingat kepala negara (raja) memiliki peran yang sangat sentral dalam pemerintahan. Maka orang yang berhak menduduki jabatan tersebut tentu bukan sembarang orang. Ibn Abi Rabi' menekankan bahwa orang yang pantas menduduki jabatan sebagai pemimpin haruslah orang dengan kriteria terbaik di antara masyarakat. Yaitu seseorang yang apabila melarang terhadap suatu perkara terlebih dahulu ia mulai dari dirinya sendiri, begitu pula apabila memerintahkan rakyatnya melakukan sesuatu hendaknya di mulai dari dirinya terlebih dahulu. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, seorang pemimpin adalah orang yang paling bijak dan adil di masyarakat. Landasan argumentasinya adalah firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang".²⁶

Maka di antara etika seorang penguasa menurutnya yaitu hendaklah seorang pemimpin melaksanakan tanggungjawabnya dengan semaksimal mungkin dan hendaklah ia mengupayakan ketaatan rakyat kepadanya adalah ketaatan atas dasar cinta, bukan kebencian serta ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Selain kriteria umum di atas, Ibn Abi Rabi' juga memberikan 6 (enam) syarat yang harus dimiliki seorang kepala negara (raja), yaitu:

(1) kekerabatan dengan raja sebelumnya,

²⁶ Al-Qur'anul Karim dan Terjemah, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Az-Ziyadah, 2014, hlm.150

- (2) kemauan yang besar,
- (3) ketajaman pikiran,
- (4) kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan,
- (5) kemampuan dalam pengelolaan finansial yang baik, dan
- (6) para pembantu yang dapat dipercaya.²⁷

Dengan demikian, seorang kepala negara akan berperilaku baik, beretika, bermoral atau berakhlak, maka dia akan dihormati dan dimuliakan, baik oleh kawan atau lawan politiknya, dan bahkan oleh seluruh rakyatnya, sehingga seorang kepala negara tidak menampilkan perilaku-perilaku yang arogan, kasar, pendusta, pembohong, penghianat, dan perilaku-perilaku negatif lainnya.

b. Keadilan

Ibn Abi Rabi' sangat berkomitmen terhadap keadilan dalam suatu pemerintahan, terbukti dengan menjadikannya salah satu dari empat pilar negara (arkân al-mamlakah). Artinya suatu pemerintahan tidak akan baik dan stabil tanpa adanya unsur keadilan. Menurut Ibn Abi Rabi' keadilan adalah hukum Allah di bumi-Nya. Bukti betapa tingginya kedudukan keadilan adalah bahwa semua bangsa, negara dan peradaban di muka bumi ini pasti berupaya menerapkan keadilan di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Keadilan juga merupakan slogan yang selalu diteriakkan di mana-mana. Bahkan setiap pemerintahan pasti memiliki pengadilan, ini artinya keadilan merupakan harga mati dalam suatu pemerintahan yang tidak dapat di tawar-tawar.

Ibn Abi Rabi' dalam konteks ini membagi keadilan pada tiga bagian pokok, yaitu:

Pertama, Keadilan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Keadilan bagian pertama ini terkait dengan pelaksanaan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib atau pun yang sunah. Contohnya seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, meramaikan tempat-tempat ibadah melalui berbagai bentuk ibadah, melaksanakan amalan-amalan sunah. Intinya patuh dan taat kepada semua perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, keadilan yang berkaitan dengan hak-hak antara sesama individu. Keadilan bagian kedua ini adalah upaya merealisasikan semua hak dan tanggung jawab kepada sesama individu dalam rangka

²⁷ Al-Tasakriti, Naji. Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi." Beirut: Dar al- Andalus, 1983, hlm.176-177

terciptanya interaksi dan komunikasi yang baik antara sesama. Contohnya; seperti menunaikan kewajiban seseorang kepada sesama individu, komitmen pada kejujuran (amanah), mengembalikan titipan (wadi'ah) kepada pemiliknya, memberikan saksi kepada yang haq (yang benar).

Ketiga, keadilan yang berkaitan dengan hak-hak orang yang sudah wafat. Keadilan bagian ketiga ini adalah berkaitan dengan semua tindakan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya seperti; mengafani dan menguburkan orang yang sudah wafat, mendidik anak-anak yatim piatu, atau memberi sedekah kepada mereka.²⁸

c. Rakyat

Menurut KBBI, rakyat adalah penduduk suatu negara. Padanan katanya dalam bahasa Arab adalah "ra'iyah" (الرعية) yaitu masyarakat umum yang berada di bawah seorang pemimpin yang mengatur urusan dan kemaslahatan mereka. Dari definisi singkat ini dapat diketahui bahwa rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara, yang mana tanpa rakyat mustahil terbentuk suatu negara. Karena itu dalam pemerintahan sebuah negara, keberadaan rakyat merupakan sebuah entitas yang tidak mungkin diabaikan. Rakyat merupakan unsur utama dan paling dominan dalam sebuah negara. Tanpa adanya rakyat, sebuah negara tidak akan pernah ada. Karena itu, Ibn Abi Rabi' menjadikan rakyat sebagai salah satu pilar sebuah negara (*arkân al-mamlakah*).

Pada hakikatnya, entitas rakyat pada suatu negara tidaklah tunggal (homogen). Rakyat adalah unsur paling majemuk (heterogen) dalam pemerintahan. Karena rakyat adalah kumpulan dari berbagai individu yang beragam. Entah keragaman dalam faktor agama, ras, bahasa, strata ekonomi, tingkatan intelektual dan sebagainya. Oleh sebab itu, penguasa sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur jalannya pemerintahan, tidak bisa menjalankan fungsinya tanpa melakukan klasifikasi terlebih dahulu. Karena itu Ibn Abi Rabi' mengklasifikasikan rakyat menjadi beberapa kategori:

Pertama, klasifikasi rakyat berdasarkan pekerjaan dan kepakarannya, yaitu:

- (1) muta'ahilun (متأهلون); orang-orang ahli ibadah dan zuhud,

²⁸ Ibnu Abi Ar-Rabi'. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. hlm.232

- (2) hukama' (حکماء); para ilmuwan seperti dokter, astronom, insinyur, matematikawan dan sebagainya,
- (3) 'ulama (علماء); pakar ilmu agama yang menjadi rujukan dalam penentuan halal-haram, tafsir dan takwil,
- (4) dzu ansab (ذوو انساب); para bangsawan dan pejabat,
- (5) arbab al-hurub (ارباب الحروب); para tentara dan polisi yang menjaga keamanan negara dari serangan pihak luar dan menjaga stabilitas negara,
- (6) 'amâr al-aswaq (عمار الأسواق); para pebisnis yang mencukupi berbagai kebutuhan pasar,
- (7) sakan al-qura (سكان القرى); orang-orang kampung yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan sebagainya.

Kedua, klasifikasi rakyat berdasarkan tingkat pembelaannya terhadap kebenaran dan kebajikan. Ibn Abi Rabi' mengklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

- (1) orang-orang baik (akhyar afadhil). Mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan dan membenci kejahatan, mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang buruk dengan suka rela. Maka golongan ini harus dimuliakan, diperlakukan dengan baik dan diangkat derajatnya oleh pemerintah karena kebaikan mereka.
- (2) orang-orang jahat (asyrar arâdzil). Mereka adalah kebalikan dari golongan pertama. Yaitu orang-orang yang condong kepada kejahatan dan kriminalitas. Anjuran-anjuran kebaikan tidak bermanfaat bagi mereka. Maka mereka harus ditindak tegas oleh pemerintah, dalam kondisi tertentu mereka perlu dijauhkan dari masyarakat. Karena mereka akan membawa pengaruh negatif bagi masyarakat.
- (3) orang-orang yang pertengahan (al-mutawasithûn). Mereka adalah orang-orang yang berada di antara golongan pertama dan kedua. Yaitu, orang-orang yang terkadang condong kepada kebaikan dan terkadang keburukan. Mereka adalah orang-orang yang perlu diarahkan. Apabila mereka salah, maka harus ditegur dan diperbaiki kesalahannya.

Melalui pengelompokan rakyat ke dalam beberapa kategori seperti yang di paparkan oleh Ibn Abi Rabi', diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Di satu sisi,

rakyat harus mengerti posisi dan kedudukannya di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus memperlakukan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan tepat sasaran sesuai posisi mereka di masyarakat. Bagi rakyat yang condong kepada kebaikan dan mendukung perbaikan, maka mereka dirangkul sebagai partner. Sedangkan bagi yang rakyat yang membangkang, maka harus ditindak dengan tegas namun tetap proporsional. Sehingga terciptalah ketertiban, kedamaian, keteraturan dan kestabilan dalam suatu negara.

d. **Pengelolaan Negara**

Setelah menerangkan tentang raja, rakyat dan keadilan sebagai pilar-pilar negara (*arkan al-mamlakah*), Ibn Abi Rabi' kemudian menerangkan pilar keempat yang bersifat lebih teknis yaitu pengelolaan negara (*tadbir*). Pengelolaan negara merupakan kemestian yang menggerakkan roda pemerintahan atau kerajaan. Pengelolaan yang baik akan berdampak lahirnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Ibnu Abi Rabi' sangat memperhatikan pada bagaimana pengelolaan negara, karena pengelolaan sebagai aktivitas yang berhubungan langsung antara pemerintah di satu sisi dan di sisi lain dengan pihak yang diperintah, yaitu rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas tentang aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan negara dan bagaimana cara pengelolaan yang ideal.

Terdapat empat kaidah metodologis dalam pengelolaan negara menurut Ibnu Abi Rabi', yaitu:

- (1) pengelolaan rakyat (*hirasat al-ri'ayah*). Pemerintah sebagai pengelola jalannya pemerintahan hendaknya menyadari bahwa kedudukan yang dimilikinya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka pemerintah tidak boleh semena-mena dan bersikap otoriter kepada rakyatnya. Nilai keadilan dalam hal ini sangat diperhatikan.
- (2) Kemakmuran negeri (*'imarah al-buldân*), meliputi aspek pertanian (*mazari'*) dan kemakmuran negara secara umum (*amshar*). Terkait pertanian, pemerintah perlu memperhatikan urusan air, yaitu terkait kelayakan dan kualitas, serta tentang pemerataan distribusinya. Adapun terkait kemakmuran negara secara umum yaitu dengan terwujudnya kedamaian dan keamanan masyarakat untuk berdomisili, terjaminnya keamanan aset dan properti, terjaminnya keselamatan kerja buruh, tercukupinya kebutuhan-

kebutuhan hidup masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

- (3) Pengelolaan kemiliteran (tadbir al-jund). Kekuatan dan kelemahan suatu negara ditentukan dari kuat lemahnya militer. Begitu juga dengan keamanan masyarakat, sangat tergantung pada kekuatan militer.
- (4) Pengelolaan ekonomi (taqdir al-amwâl) yang meliputi perputaran ekonomi dalam dan luar negeri.

C. KESIMPULAN

Pandangan Ibn Abi Rabi' tentang negara tidak sama persis dengan pandangan para pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles, karena dalam pandangan Ibn Abi Rabi' terkandung worldview Islam yang kental. Meskipun pemikiran Ibn Abi Rabi' tidak sama persis dengan Plato, tapi sejalan dengan pandangan Plato, bahwa sebaiknya penguasa atau pemimpin tersebut seorang yang dimuliakan di negara atau kota itu. Dari sekian banyak bentuk pemerintahan, ia lebih memilih monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja atau penguasa tunggal, sebagai bentuk yang terbaik. Alasan utamanya adalah dengan banyak kepala, maka politik negara akan kacau dan sukar membina persatuan.

Ia menolak bentuk-bentuk lain seperti aristokrasi, oligarki, demokrasi, bahkan demagogi, yang mana apabila para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh negara secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian memicu kekacauan. Ibnu Abi Rabi' menetapkan dasar bagi otoritas dan hak istimewa raja dari ajaran agama. Ia mengatakan, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para raja dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya.

Ia berpedoman kepada dua ayat Al-Qur'an, yaitu QS. al-An'am: 165, bahwa menurut Ibnu Abi Rabi' dasar kekuasaan dan otoritas raja adalah mandat dari Tuhan. Tentang siapa yang berhak menjadi raja, ia mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjadi raja, yaitu:

- 1) Paternalistik, yakni termasuk keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya,
- 2) Aspirasi yang luhur,
- 3) Pandangan yang tepat dan kuat,
- 4) Ketahanan dalam menghadapi kesukaran/tantangan,
- 5) Memiliki kekayaan yang besar, dan

6) Memiliki pembantu-pembantu yang setia.

Namun, yang agak unik darinya, ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syaratnya.

Selain itu bentuk pemerintahan yang paling ideal menurut Ibn Abi Rabi' adalah model monarki (kerajaan), dengan argumentasi bahwa jika sebuah negara dipimpin oleh banyak pemimpin, maka perpolitikan akan kacau, banyak konflik yang menyebabkan negara selalu gonjang-ganjing (tidak stabil). Ibn Abi Rabi' merumuskan (4) empat pilar utama dalam pembentukan suatu negara (*arkân al-mamlakah*), yaitu:

- 1) *kepala negara*,
- 2) *keadilan*,
- 3) *rakyat*, dan
- 4) *pengelolaan*.

Apabila keempat pilar tersebut dapat dipenuhi dengan seideal mungkin, maka akan tercipta suatu negara yang stabil dan kuat secara politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemah, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Az-Ziyadah, 2014.
- M. Ilham et al, "Caliphate; Is It Theological Inevitability or Sociological Experimentation?," dalam *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021).
- Adil Tsabit, *Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi* (Alexandria: Dar al-Jami'ah al-Jadid, 2002).
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syihabuddin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abi Ar-Rabi'. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. Riyadh: Dar al-'Adzariyah, 2010.
- Muhammad Jalal Syaraf. *Nasy'ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam*. Dar al-Ma'rifah al-Jami'ah, 1990.
- Al-Tasakriti, Najj. *Al-Falsafah Al-Siyasah "inda Ibn Abi Al-Rabi."* Beirut: Dar al-Andalus, 1983.
- Munawir Sjadzali. *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*. Jakarta: UI- Press, 1993.
- Sirojuddin Aly. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Zarkali. *Al-A'lam*. Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayin, n.d.
- Kahalal. *Mu'jam Al-Mu'alifin*. Beirut: Mu'asasah al-Risalah, n.d.
- Khotimah, "Agama Dan Civil Society," dalam *Ushuluddin* 1, no. 0 (2014).
- Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020).
- Mohammad Latief dan Adib Fattah Suntoro, *SISTEM DAN PILAR-PILAR NEGARA DALAM PEMIKIRAN IBN ABI RABI' (218-272 H): SEBUAH KAJIAN LITERATUR*, RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022.
- Mahsun Fuad, Makalah; *DISKURSUS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PRA MODERN*, Institut Agama Islam Ngawi, t.t.